



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DUKUNGAN KABINET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SATYA BHAKTI PARIKESIT**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**
3. NHK : **135070**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.007.584.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/234 m2 di KAB / KOTA BOGOR, Rp. 3.114.864.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/25 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 646.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/74 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
4. Tanah Seluas 292 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 770.880.000
5. Tanah Seluas 256 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 675.840.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.601.200.000**

1. MOTOR, YAMAHA B65/SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HADIAH Rp. 15.000.000
2. MOTOR, GESITS G1 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 L TURBO PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 393.200.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S HV CVT TSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
6. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2023, HASIL SENDIRI



Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 151.274.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 593.217.970

F. HARTA LAINNYA

Rp. 16.200.000

Sub Total

Rp. 10.369.475.970

III. HUTANG

Rp. 2.857.955.911

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.511.520.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.